

LAPORAN MONEV KINERJA INTERNAL TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA TARAKAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan telah melakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Monev kinerja Internal Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Adapun penyajian monev kinerja ini mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025.

Monev kinerja internal triwulan I dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan setiap triwulan sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Setelah melakukan Monev Internal Triwulan I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan mengharapkan selain sebagai tolok ukur penilaian kinerja triwulan berikutnya juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program dan kegiatan tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sehingga tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target dapat tercapai sesuai rencana.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan monev kinerja triwulan I ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas capaian kinerja triwulan berikutnya untuk dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Tarakan, 14 April 2025
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan



Hasman Parigi, S.E, M.M
Pembina /IVa
NIP. 19720822 2010011 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja PD

Evaluasi Renja perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian antara Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan, Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan, dan Hasil rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melakukan Evaluasi perlu diperhatikan beberapa unsur pokok yaitu Tujuan yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah, sasaran untuk mewujudkannya, program, indikator kinerja, target kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

a. Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan integral dalam proses perencanaan yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang ada. Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga

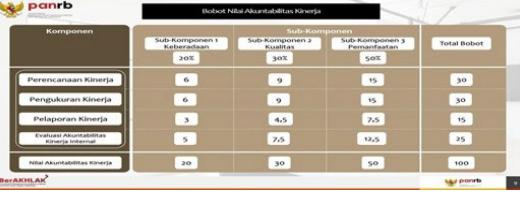
3. Terwujudnya kesejahteraan keluarga
4. Meningkatnya tata kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus/Fonnula | Sumber Data | Penanggung jawab |
|-----|---|---|--|---|---|
| 1. | Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | $IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ $IPG = (IPM \text{ Perempuan}) / (IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$ I Kesehatan = Umur Harapan Hidup Saat Lahir I Pendidikan = Pengabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) I Pengeluaran = Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender | Badan Pusat Statistik | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | $IDG = \frac{1}{3} (I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{dis}))$ I(par) = Indeks kelebihan perempuan di parlemen I(DM) = Indeks pengambilan kepuruhan I(dis) : Indeks distribusi pendapatan | | |
| 2. | Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga | Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) | = jumlah kasus perempuan usia 15-64 tahun / jumlah perempuan usia 15-64 tahun * 100 persen | Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) | Jumlah kasus anak usia 13-17 tahun / jumlah anak usia 13-17 tahun * 100 persen | | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| 3. | Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | $TFR = \sum_i ASFR_i$ | Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Bidang Pengendalian Penduduk dajJ Keluarga Berencana |
| | | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) | Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur seluruhnya dikalikan 100 | Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Bidang Pengendalian Penduduk dajJ Keluarga Berencana |
| 4. | Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Nilai SAKIP |  | APIP | Sekretariat |

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra. Penetapan Kinerja ditetapkan pada DPA tahun 2025 disahkan. Perjanjian Kinerja tahun 2025 memuat target indikator kinerja atas sasaran serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan beserta anggarannya. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar monev kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

| | Indikator Kinerja | Target | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| S.S.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | | |
| IKU 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,8 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 |
| IKU 2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 68,6 | 68,8 | 69 | 69,5 | 69,64 |
| S.S. 2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga | | | | | | |
| IKU 3 | Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) | 0.00025 | 0.00024 | 0.00023 | 0.00022 | 0.00021 |
| IKU 4 | Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) | 0.00097 | 0.00096 | 0.00095 | 0.00094 | 0.00093 |
| S.S. 3. Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga | | | | | | |
| IKU 5 | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,2 |
| IKU 6 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | 62 | 62,5 | 62,8 | 63 | 63,3 |
| S. S. 4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | |
| IKU 7 | Nilai SAKIP | 85,9 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 |
| IKU 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,74 | 88,75 | 88,76 | 88,77 | 88,78 |

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target capaian indikator kinerja terhadap capaian kinerja. Capaian target kinerja hingga 31 Maret 2025 dan realisasi hingga 31 Maret 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja pada lampiran Laporan Monitoring dan Monev kinerja Internal triwulan I:

Dari tabel formulir pengukuran kinerja dapat dijelaskan bahwa beberapa kinerja dengan target triwulan I telah tercapai, sementara kinerja lain belum ada realisasi capaian kinerja dikarenakan target capaian kinerja dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Untuk Realisasi Anggaran triwulan I sebesar 1.059.113.182,00 (14,65%) dari total anggaran yang sudah kita anggarkan sebesar Rp. 7.227.616.973,00

Dalam Pelaksanaan program kegiatan pada triwulan I ada kendala yang dihadapi, dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025 dan Kenaikan Gaji 8% yang mengharuskan daerah menyesuaikan kembali Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja (APBD). Selain itu adanya keterlambatan Juknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik sehingga perlu dilakukan penyesuaian Sub Kegiatan pada Renja Dinas dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja (APBD).

FORMAT PENGUKURAN KINERJA

| | |
|------------------|---|
| PERANGKAT DAERAH | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| TRIWULAN | : PERTAMA |
| TAHUN ANGGARAN | : 2025 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persentase | Program | Anggaran | | Percentase |
|-----|---|---|--------|--------|-----------|------------|---|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | Pagu | Realisasi | |
| 1. | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | IPG | indeks | 92,30 | 92,79 | 100,53 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 338.388.800 | 0 | 0,00 |
| | | IDG | indeks | 60,13 | 68,54 | 113,99 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 45.458.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 5.451.400 | 0 | 0,00 |
| 2. | Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP) | % | 0,03 | 0,00007 | -99,77 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 291.611.260 | 0 | 0,00 |
| | | Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) | % | 0,12 | 0,00034 | -99,72 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 270.037.300 | 0 | 0,00 |

Bukti Laporan Monev Kinerja Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|-------|--------|--|----------------------------------|---------------|------------|------|
| | pemberdayaan keluarga | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 395.054.670 | 12.654.745 | 3,20 |
| 3. | Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga | Percentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) | % 67,2 | 69,76 | 103,8 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 267.121.240 | 5.080.200 | 1,90 | |
| | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1.139.495.780 | 46.869.601 | 4,11 | |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 658.693.850 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4. | Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Nilai LKIP | Skor 72 | 85,87 | 119,26 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.072.301.843 | 994.508.636 | 24,42 | |
| TOTAL | | | | | | | 7.483.614.143 | 1.059.113.182 | 14,15 | |

KENDALA : surat penyediaan dana hanya untuk rutin dan dak non fisik sehingga penyerapan tidak maksimal

TINDAK LANJUT : ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya

Tarakan, 14 April 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19720822 2010011 001

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada indikator capaian kinerja posisi 31 Maret 2025 sesuai dengan target kinerja pada triwulan I yang telah ditargetkan pada rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025, untuk persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara indikator lain belum tercapai karena target capaian pada triwulan ke empat.

Capaian Kinerja Program/Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 TRIWULAN : PERTAMA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Percentase | Program | Anggaran | | Percentase |
|-----|-----------------------------------|--|---------|--------|-----------|------------|---|---------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | Pagu | Realisasi | |
| 1. | Meningkatnya tata kelola DP3APPKB | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia | dokumen | 1 | 0 | 0 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 1 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan WalidataPendukung Statistik Sektoral Daerah | laporan | 1 | | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | layanan | 2 | 0 | 0 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.668.005.021 | 955.180.384 | 26,04 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 58.926.000 | 6.921.000 | 11,75 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|------|--|------------|------------|--------|
| <i>Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana</i> | layanan | 4 | 0 | 0 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | |
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 0 | 0,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.072.520 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 1 | 0 | 0,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.979.500 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.000.000 | | |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 7 | 0 | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 52.441.800 | 6.525.000 | 12,44 |
| <i>Jumlah aset/BMD yang diadakan</i> | layanan | 1 | 0 | 0,00 | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | |
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yg diadakan | unit | 9 | 0 | 0,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.277.850 | 0 | 0,00 |
| <i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</i> | layanan | 5 | 0 | 0 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.931.218 | 12.614.452 | 16,61 |
| <i>Jumlah aset/BMD yang dipelihara</i> | | | | | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------|----|------|------|--|---------------|-------------|-------|
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 8 | 0,00 | 0,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.269.000 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 14 | 0,00 | 0,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48.528.934 | 11.267.800 | 23,22 |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 15 | 0 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.870.000 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 4.072.301.843 | 994.508.636 | 24,42 |

KENDALA

: surat penyediaan dana hanya untuk rutin dan dak non fisik sehingga penyerapan tidak maksimal

TINDAK LANJUT

: ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya

Tarakan, 14 April 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19720822 2010011 001

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 TRIWULAN : PERTAMA
 TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PENGUKURAN KINERJA BIDANG PPPA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 TRIWULAN : PERTAMA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persentase | Program | Anggaran | | Percentase |
|-----|---|---|------------|--------|-----------|------------|---|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | Pagu | Realisasi | |
| 1. | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 1. Cakupan PUG yang aktif | % | 12,00 | 0 | 0 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| | | 0 <i>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</i> | lembaga | 1,00 | 0 | 0 | <i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | OPD | 30,00 | 0 | 0 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 38.388.800 | 0 | 0 |
| | | <i>Jumlah lembaga yang dibina</i> | organisasi | 2 | 0 | 0 | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|-------|---|--|---|-------------|---|------|
| | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | organisasi | 2 | 0 | 0 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 0 | |
| 2 | Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani | % | 100 | 0 | 0 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |
| | 0 | <i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i> | kegiatan | 4,00 | 0 | 0 | <i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| | 0 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 1,00 | 0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 69.441.680 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Jumlah kasus yang mendapat pelayanan</i> | kasus | 20,00 | 2 | 10 | <i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | |
| | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | orang | 90,00 | 2 | 2,22222222 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 115.554.400 | 0 | 0,00 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | |
|--|---------|------|---|---|---|------------|---|------|
| Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | layanan | 4,00 | 0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 87.763.690 | 0 | 0,00 |
| <i>Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi</i> | lembaga | 1,00 | 0 | 0 | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | orang | 50 | 0 | 0 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.851.220 | 0 | 0 |
| <i>Percentase Puspusga yang aktif</i> | % | 25 | 0 | 0 | <i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i> | | | |
| <i>Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi</i> | buaH | 100 | 0 | 0 | <i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | dokumen | 1 | 0 | 0 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 13.946.000 | 0 | 0 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----|---|---|---|------------|---|---|
| Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 0 | 0 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 9.398.200 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i> | <i>organisasi</i> | 2 | 0 | 0 | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | orang | 30 | 0 | 0 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12.174.800 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak</i> | <i>layanan</i> | 40 | 0 | 0 | <i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | layanan | 40 | 0 | 0 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 9.939.000 | 0 | 0 |
| <i>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak</i> | <i>%</i> | 100 | 0 | 0 | <i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i> | | | |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|---|---|---|------------|---|------|
| | <i>Jumlah dokumen responsif gender</i> | dokumen | 1 | 0 | 0 | <i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 0 | 0 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 5.451.400 | 0 | 0 |
| | <i>Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak</i> | point | 875 | 0 | 0 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | |
| | <i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i> | gugus tugas | 1 | 0 | 0 | <i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | |
| | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | organisasi | 39 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 60.459.200 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 24 | 0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 37.697.500 | 0 | 0,00 |
| | <i>Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif</i> | | | | | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|---|---|--|-------------|-----------|-------|
| Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 4 | 0 | 0 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 21.880.600 | 0 | 0,00 |
| Percentase korban kekerasan anak yang terlayani | 100% | 100 | 0 | 0 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | |
| <i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak</i> | <i>4 Kegiatan</i> | | | | <i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 5 Perangkat daerah | 1 | 0 | 0 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 82.170.000 | 9.219.000 | 11,22 |
| <i>Jumlah kasus anak</i> | <i>kasus</i> | 90 | 0 | 0 | <i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | Orang | 90 | 0 | 0 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 18.317.560 | 0 | 0,00 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----|----|-------------|--|---------------|------------|------|
| | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | layanan | 90 | 12 | 13,33333333 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 203.716.100 | 3.435.745 | 1,69 |
| | <i>Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan</i> | <i>lembaga</i> | 5 | 0 | 0 | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten | laporan | 1 | 0 | 0 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten | 70.020.000 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana) | orang | 20 | 0 | 0 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | 20.931.010 | 0 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | | | 1.346.101.160 | 12.654.745 | 0,94 |

KENDALA

: surat penyediaan dana hanya untuk rutin dan dak non fisik sehingga penyerapan tidak maksimal

TINDAK LANJUT

: ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya

Tarakan, 14 April 2025

Mengetahui,

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19720822 2010011 001

FORMAT PENGUKURAN KINERJA BIDANG PPKB

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 TRIWULAN : PERTAMA
 TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PENGUKURAN KINERJA BIDANG PPKB

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 TRIWULAN : PERTAMA
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persentase | Program | Anggaran | | Percentase |
|-----|------------------------------------|--|---------|--------|-----------|------------|---|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | Pagu | Realisasi | |
| 1. | Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga | Percentase keluarga yang terdata | % | 50,00 | 0 | 0,00 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | |
| | | Jumlah dokumen data keluarga | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 14.397.600 | 0 | 0,00 |
| | | Jumlah Data dan Informasi Keluarga | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | 122.444.840 | 0 | 0,00 |
| | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 77.278.800 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----|---|------|---|-------------|-----------|------|
| | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 53.000.000 | 5.080.200 | 9,59 |
| | Percentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK | % | 84 | 0 | 0,00 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | |
| | <i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i> | layanan | 3 | 0 | 0,00 | <i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i> | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 127.000.000 | 8.069.601 | 6,35 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----|---|------|---|-------------|------------|-------|
| | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 95.196.000 | 14.400.000 | 15,13 |
| | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 70.800.000 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 14.700.000 | 0 | 0 |
| | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | organisasi | 10 | 0 | 0,00 | Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 90.226.000 | 21.100.000 | 23,39 |
| | <i>Jumlah tenaga penyuluhan KB dan petugas lapangan KB yang aktif</i> | orang | 17 | 0 | 0,00 | <i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i> | | | |
| | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | kader | 80 | 0 | 0,00 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 144.000.000 | 0 | 0 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------|
| | <i>Jumlah pelayanan KB</i> | <i>layanan</i> | 4 | 0 | 0,00 | <i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 34.300.000 | 0 | 0 |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | orang | 144 | 0 | 0,00 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 476.724.000 | 3.300.000 | 0,69 |
| | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | unit | 1 | 0 | 0,00 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 999.780 | 0 | 0 |
| | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 31.150.000 | 0 | 0 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|----------|-------------|---|------------|---|---|
| | <i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK</i> | <i>mitra kerja</i> | <i>80</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB</i> | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Kampung KB | 4 | 0 | 0,00 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 51.400.000 | 0 | 0 |
| | Percentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina | % | 100 | 0 | 0,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) | | | |
| | <i>Jumlah kegiatan</i> | <i>kegiatan</i> | <i>2</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i> | | | |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----|---|------|---|------------|---|---|
| | Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 10.000.000 | 0 | 0 |
| | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA) | unit | 20 | 0 | 0,00 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 9.999.050 | 0 | 0 |
| | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | orang | 30 | 0 | 0,00 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 46.577.600 | 0 | 0 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|----------|----------|-------------|--|---------------|------------|------|
| | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | kelompok | 2 | 0 | 0,00 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 7.917.200 | 0 | 0 |
| | Jumlah kegiatan | kegiatan | 2 | 0 | 0,00 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 266.000.000 | 0 | 0 |
| | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | laporan | 1 | 0 | 0,00 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 318.200.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | | | 2.463.137.061 | 51.949.801 | 2,11 |

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

Tarakan, 14 April 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19720822 2010011 001

BAB III

PENUTUP

31.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Monev kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 Triwulan I adalah:

1. Capaian kinerja belum tercapai secara keseluruhan disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya Penyesuaian Juknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2025 sehingga diperlukan Penyesuaian Kembali pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 (APBD).
2. Ada indikator capaian kinerja posisi 31 Maret 2025 sesuai dengan target kinerja pada triwulan I yang telah ditargetkan pada rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025, untuk sementara indikator lain belum tercapai karena target capaian pada triwulan ke-empat.

31.2 Saran

Adapun saran untuk perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yaitu:

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi setiap bulannya untuk diambil tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi.
2. Memotivasi SDM yang ada untuk terus meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik.

Lampiran :

1. Notulen Rapat
2. Dokumentasi Rapat
3. Absen

DOKUMENTASI RAPAT MONEV KINERJA TW I
Senin, 14 April 2025



Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan I DP3APPKB

NOTULEN
RAPAT MONEV KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Senin, 14 April 2025 |
| Waktu | : | 08.00 wita sampai dengan selesai |
| Tempat | : | Ruang Kerja Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan |
| Agenda Rapat | : | Monev kinerja Triwulan I (Jan s/d Maret 2025) |
| | : | |
| 1. Pimpinan Rapat | : | Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan |
| 2. Tujuan Rapat | : | Monev kinerja dan mengetahui kendala pencapaian realisasi triwulan I |
| 3. Peserta Rapat | : | Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid PPPA, Kabid PPKB, Kasubag, Jafung dan staf |
| 4. Pembukaan oleh Kepala Dinas | : | Kepala Dinas menyampaikan maksud dan tujuan diadakan rapat dan meminta kepada kepala bidang untuk menyesuaikan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada anggaran kas, jangan sampai serapan realisasinya rendah. |
| 5. Jalannya Rapat oleh Sekretaris | : | Rapat monev kinerja hari ini akan membahas 3 agenda, yaitu terkait evaluasi kinerja serta kendala dalam capaian realisasi triwulan I dan rencana aksi serta monev RTP |
| 6. Kabid PPPA & Kabid PPKB | : | Penyerapan anggaran belum sesuai dengan target rencana aksi dan tarikan anggaran kas, untuk itu pada triwulan selanjutnya . |
| 7. Kabid PPPA & | : | Untuk sumber dana APBD rata-rata jadwal pelaksanaanya terletak pada triwulan II dan triwulan III. |
| 8. Kesimpulan | : | Untuk kedepannya PPTK harus menyelaraskan tarikan anggaran kas yang sesuai agar serapan realisasinya sesuai dengan target baik kinerja, rencana aksi dan RTP |
| 9. Penutup oleh Sekretaris | : | Rapat ditutup dengan harapan rapat monev kinerja hari ini dapat acuan perbaikan pada triwulan selanjutnya, sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja dan tepat sasaran. |

Tarakan, 14 April 2025
Mengetahui
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan



Hasman Parigi, S.E, M.M
Pembina /IVb
NIP. 19720822 2010011 001

